

## ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008-2012

Silviana  
Melisa

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama Bandung

### ABSTRACT

*This study aims to determine how the performance of local government finance Bandung by using financial ratios. Tool for analyzing the financial performance of local governments in managing the financial area by using financial ratio analysis to the budget. Furthermore, analysis of financial ratios are used to benchmark the level of financial independence in financing the implementation of regional autonomy, measure effectiveness in realizing regional income, measuring the financial efficiency in spending are being spent in accordance with and meet the designation of what is planned, financial activities in spending local revenues for capital expenditure and find out how much revenue contribution in the revenue component is local taxes and levies.*

*The location of this research is meticulous in Bandung local government. The data analyzed were Realization Reports Revenue and Expenditure in the year 2008 to 2012 analytical tool used to determine the financial performance of the city is the ratio of the independence, effectiveness ratios, growth ratios, activity ratios, the ratio of the degree of fiscal decentralization and fiscal capacity ratio.*

*The results of the study showed that the performance of local government finance Bandung seen from independence ratio inferred dependent, seen from Bandung effectiveness ratio is said to have been effective in the realization of local revenue, the ratio of visible growth pertumbuhan revenue more years the better, in terms of the ratio activities of local governments are more likely to use their income instead of operating expenditure to capital expenditure, based on the ratio of the degree of decentralization, we conclude bandung getting better from year to year because of its dependence on aid center dwindle and when seen from the ratio of fiscal capacity, fiscal capacity bandung not too far from the standard fiscal capacity of West Java.*

*Keywords: Performance, Analysis of financial performance, APBD*

### PENDAHULUAN

Penggunaan analisis rasio laporan keuangan sebagai alat analisis keuangan secara luas sudah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Penggunaan analisis rasio laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan dan juga dapat dijadikan sebagai acuan untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah daerah, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah.

Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah dilakukan demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam era otonomi daerah dan untuk menghadapi pelemahan pertumbuhan ekonomi daerah akibat adanya krisis ekonomi 2008. Beberapa alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, diantaranya menggunakan rasio kemandirian, rasio efektifitas, rasio efisiensi, rasio aktifitas, rasio

pengelolaan belanja, rasio pertumbuhan, rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kebutuhan fiskal dan rasio kapasitas fiskal.

Fenomena mengenai kinerja Pemerintah Daerah Kota Bandung diantaranya ada beberapa program pemerintah yang sepenuhnya belum terlaksana dengan baik, seperti realisasi pelaksanaan program dan kegiatan belanja langsung urusan wajib dan pilihan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun 2011, pada urusan pendidikan ; Program Pendidikan Menengah ; Kegiatan penerapan *E-Learning* Berbasis *Web* di SMA 2 (Banprov) yg ditangani oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung ternyata tidak terealisasi dikarenakan adanya perbedaan Proposal Sekolah dengan prosedur pengelolaan keuangan sehingga perbaikan perlu dilakukan sehingga tidak cukup waktu untuk pelaksanaan kegiatan. Padahal untuk kegiatan ini telah dianggarkan anggaran sebesar Rp.1.000.000.000. (Sumber :LKPJ Walikota Bandung 2011).

Terjadi kasus pada Rekapitulasi Anggaran Dan Realisasi Berdasarkan Misi Pembangunan Kota Bandung Tahun 2011, dengan Misi Pengembangan Sumber Daya Manusia ; Urusan Pendidikan ; Program Pendidikan Menengah dari 11 jumlah kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.6.306.905.997, hanya dapat terealisasi sebesar Rp. 3.849.144.650 mendapatkan persentase sebesar 61,03%. tidak hanya itu pada Capaian Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2011 dalam Indikator Angka Melek Huruf (AMH), dari target sebesar 100,00% dapat terealisasi sebesar 99,55% (sumber: BPS).

Sementara dalam kasus lain dugaan korupsi dana hibah Pemkot Bandung senilai Rp 2,17 miliar. KS yang menjabat sebagai Ketua Badan Kehormatan DPRD Kota Bandung dan Wakil Ketua II DPC Partai Demokrat Kota Bandung, ditetapkan sebagai tersangka. Dalam kasus ini KS telah membantu meloloskan pengajuan proposal permintaan bantuan dana hibah dari Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera kepada Pemkot Bandung. Namun setelah anggarannya cair, ternyata dana hibah dari APBD itu tidak semuanya diterima oleh Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera. Dari hasil pemeriksaan para saksi dan barang bukti, ternyata dari kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Bandung senilai Rp 2,17 miliar. Kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkot Bandung senilai Rp 2,17 miliar, total dana hibah Rp 2,17 miliar itu separuhnya diambil oleh tersangka "K" (Infobandung.co.id).

Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kota Bandung, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota Bandung tahun 2008-2012". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pada pemerintah daerah Kota Bandung ditinjau dari rasio keuangan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

## **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

### **Kinerja Keuangan Daerah**

#### **Pengertian Kinerja**

John Witmore dalam Rusydi (2010) menyatakan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi yang dituntut dari seorang atau suatu perbuatan, suatu prestasi, suatu pameran umum keterampilan. Kinerja merupakan suatu kondisi yang harus diketahui dan dikonfirmasi kepada pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi atau perusahaan serta mengetahui dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan operasional.

Pemerintah daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan roda pemerintahan, pembangunan, dan layanan sosial masyarakat wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak. Adanya tuntutan pertanggungjawaban kinerja keuangan oleh masyarakat mengharuskan pemerintah daerah otonom untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerjanya. Penilaian kinerja tersebut harus dapat memberikan informasi yang transparan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat ikut mengontrol kinerja keuangan daerah tersebut. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah. (Tri Suparto:2007)

Penilaian kinerja (*performance appraisal*) pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan, melalui penilaian tersebut maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja lembaga. (Bahrul:2010)

### **Pengukuran Kinerja**

Definisi pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagai suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan (program) sesuai dengan sasaran dan tujuan dan misi instansi pemerintah. Sejalan dengan itu Simons (1995) menyatakan sistem pengukuran kinerja dapat membantu pengelola dalam memonitor implementasi strategi organisasi dengan cara membandingkan antara hasil/*output actual* dengan sasaran dan tujuan strategi. Dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam membangun dan evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja di bidang keuangan daerah, dapat menggunakan Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diterapkan sesuai dengan berbagai aspek dan unsur dalam bidang keuangan daerah, yang menyangkut pencapaian kinerja komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah/PAD (khususnya padak daerah dan retribusi daerah), pendapatan daerah (Bagian Keuangan, Dispenda, dan lainnya). Dengan demikian pencapaian kinerja keuangan daerah dapat dilakukan pengukuran secara rinci dan komprehensif serta dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Penggunaan analisis rasio pada sektor publik belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap laporan keuangan daerah perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam laporan keuangan daerah berbeda dengan laporan keuangan perusahaan swasta (Ihyaul Ulum, 2009).

### **Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus-menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang. (Dora Detisa:2009)

Salah satu alat menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah

ditetapkan dan dilaksanakan. Menurut Widodo dalam Detisa (2009) hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah
- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

### **Tolok Ukur Kinerja keuangan**

Rahardjo (2011), Tolok ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja, terutama untuk menilai kewajaran anggaran biaya suatu program atau kegiatan. Tolok ukur kinerja mencakup dua hal yaitu unsur keberhasilan yang terukur dan tingkat pencapaian setiap unsur keberhasilan. Setiap program atau kegiatan minimal mempunyai satu unsur keberhasilan dan tingkat pencapaiannya (target kinerja) yang digunakan sebagai tolok ukur kinerja. Program atau kegiatan tertentu dapat diukur berdasarkan lebih dari satu unsur ukuran keberhasilan. Untuk menentukan apakah suatu perusahaan sehat atau tidak dari sisi keuangan dapat dilakukan dengan dua macam metode, yaitu :

1. Metode Lintas Waktu (*Time Series*)  
Metode ini merupakan metode tolok ukur analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara membandingkan suatu rasio keuangan perusahaan dari satu periode tertentu dengan periode sebelumnya.
2. Metode Lintas Seksi/Industri (*Cross Section*)  
Metode ini merupakan metode tolok ukur yang digunakan menentukan sehat tidaknya posisi keuangan perusahaan yang dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu dengan rasio keuangan rata-rata industrinya yang bersangkutan.

### **Jenis Indikator Kinerja Pemerintah Daerah**

Mohamad Mahsun (2006:77), Indikator kinerja Pemerintah Daerah terdapat beberapa jenis yaitu :

1. Indikator masukan (*Input*), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Misalnya :
  - a. Jumlah dana yang dibutuhkan.
  - b. Jumlah pegawai yang dibutuhkan.
  - c. Jumlah infrastruktur yang ada.
  - d. Jumlah waktu yang digunakan.
2. Indikator proses (*Process*). Organisasi/ instansi merumuskan ukuran kegiatan, baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Rambu yang paling dominan dalam proses adalah tingkat efisiensi dan ekonomis pelaksanaan kegiatan organisasi/ instansi. Misalnya :
  - a. Ketaatan pada peraturan perundangan.
  - b. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Indikator keluaran (*Output*), adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non-fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Misalnya :

- a. Jumlah produk atau jasa yang dihasilkan.
  - b. Ketepatan dalam memproduksi barang atau jasa.
4. Indikator hasil (*Outcomes*), segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). *Outcome* menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator ini, organisasi/ instansi akan dapat mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.
  5. Indikator dampak (*Impact*), pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif. Misalnya:
    - a. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.
    - b. Peningkatan pendapatan masyarakat

### Analisis Rasio Keuangan Berdasarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Beberapa jenis rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD menurut Ihyaul Ulum (2009), antara lain:

#### a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah (*otonomi fiskal*) menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain, misalnya bantuan pemerintah pusat dalam konteks otonomi daerah bisa dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemudian dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{pendapatan asli daerah (PAD)}}{\text{bantuan pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman}}$$

#### b) Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{rasio efektivitas} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}}{\text{target penerimaan PAD ditetapkan berdasarkan potensi riil daera}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut dibandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemerintah daerah.

#### c) Rasio Efisiensi PAD

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien

apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik.

$$\text{rasio efisiensi} = \frac{\text{biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{realisasi penerimaan daerah}}$$

Elemen biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD dalam konteks ini adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh dinas-dinas pengumpul PAD. Biaya tersebut termasuk biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Biaya langsung misalnya gaji dan upah karyawan bagian pemungutan pajak dan retribusi daerah, sedangkan biaya tidak langsung misalnya biaya-biaya penyuluhan dan biaya iklan layanan yang ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan daerah.

**d) Rasio Pertumbuhan (*Growth Ratio*)**

Rasio pertumbuhan (*growth Ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian.

$$\text{Rasio pertumbuhan PAD} = \frac{\text{realisasi penerimaan PAD}_{x_n - x_{n-1}}}{\text{realisasi penerimaan PAD}_{x_{n-1}}}$$

Mengacu pada PP No. 24 Tahun 2005 dan PP No. 58 Tahun 2005 maka perhitungan rasio pertumbuhan dapat disesuaikan dengan mengganti belanja rutin dan belanja pembangunan menjadi belanja operasi dan belanja modal.

**e) Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk daerah (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) dan Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Tim peneliti FISIPOL UGM bekerja sama dengan Litbang Depdagri (1991; 19) menentukan tolak ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD sebagai berikut (Dasril Munir, 2004:106).

**Tabel 1 Skala Interval Derajat Desentralisasi Fiskal**

PAD/TPD %	Kemampuan Keuangan Daerah
00 – 10.00	Sangat kurang
10.01 – 20.00	Kurang
20.01 – 30.00	Cukup
30.01 – 40.00	Sedang
40.01 – 50.00	Baik
>50.00	Sangat baik

Sumber : Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah (Dasril Munir, 2004: 106).

**f) Kapasitas Fiskal**

Kapasitas fiskal adalah sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak (*tax base*), yang biasanya berupa pendapatan per kapita (M. Suparmoko, 1992:230). Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal daerah pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Variabelvariabel potensi daerah terdiri dari potensi PAD dan potensi penerimaan bagi hasil.

**Kerangka Penelitian**

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya buruk. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Analisis kinerja keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu rasio kemandirian, rasio efektifitas dan rasio efisiensi (Halim, 2004).

Rasio kemandirian keuangan daerah atau yang sering disebut sebagai otonomi fiskal menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio ini juga menggambarkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio ini, maka tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah, begitu pula sebaliknya (Soleh, 2010).

Efektivitas dianggap sangat penting untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya (Mahsan, 2006).

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif, begitu pula sebaliknya. Nilai efektifitas diperoleh dari perbandingan sebagaimana tersebut diatas, diukur dengan kriteria penilaian kinerja keuangan (Budiarto, 2007).

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan baik dan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan telah dikerjakan secara efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil (*output*) dengan biaya (*input*) yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan. Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan (Budiarto, 2007).

Faktor penentu efisiensi dan efektifitas: terdiri dari a. Faktor sumber daya, baik sumber daya manusia seperti tenaga kerja, kemampuan kerja maupun sumber daya fisik seperti peralatan kerja, tempat bekerja serta dana keuangan; b. Faktor struktur organisasi, yaitu susunan yang stabil dari jabatan-jabatan, baik itu struktural maupun fungsional; c. faktor teknologi pelaksanaan pekerjaan; d. faktor dukungan kepada aparaturnya dan pelaksanaannya, baik pimpinan maupun masyarakat; e. Faktor pimpinan dalam arti kemampuan untuk mengkombinasikan keempat faktor tersebut kedalam suatu usaha yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai sasaran yang dimaksud (Budiarto, 2007).

Rasio aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

Secara umum pertumbuhan ekonomi dapat diartikan perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Pertumbuhan ekonomi dapat juga diartikan sebagai kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP) atau *Gross National Product* (GNP) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu negara dalam menyediakan kebutuhan akan barang dan jasa kepada masyarakat dalam jumlah yang banyak sehingga memungkinkan untuk kenaikan standar hidup yang mana berdampak pula bagi penurunan tingkat pengangguran dalam jangka panjang.

## **METODE PENELITIAN**

Objek penelitian ini adalah kinerja keuangan, subjek penelitian pemerintah kota Bandung. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka yang termuat dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2008-2012 serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

### **Operasionalisasi variabel**

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu dipahami berbagai unsur-unsur yang menjadi dasar dari suatu penelitian ilmiah yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup beberapa parameter berupa rasio.

**Tabel 2**  
**Operasionalisasi Variabel**

Variabel	Dimensi	Konsep	Indikator	Skala
Kinerja Keuangan	Rasio Kemandirian	menunjukkan kemampuan Pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat.	$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Bantuan Pusat/propinsi}}$	Rasio
	Rasio Efektifitas	kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.	$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}}$	Rasio
	Rasio Pertumbuhan	mengukur seberapa besar kemampuan Pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya.	$\text{PAD} = \frac{\text{PADt1} - \text{PADt0}}{\text{PADt0}}$	Rasio
	Rasio Aktivitas	menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk belanja dengan realisasi APBD.	$\text{Rasio Belanja Rutin} = \frac{\text{Total Belanja Rutin}}{\text{Total Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah}}$ $\text{Rasio Belanja Pembangunan} = \frac{\text{Total Belanja Pembangunan}}{\text{Total Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah}}$	Rasio
	Rasio Derajat Desentralisasi Skala	Rasio Derajat desentralisasi fiskal menggambarkan saling ketergantungan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah	$\text{Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}}$	Rasio
	Rasio Kapasitas Fiskal	Rasio kebutuhan fiskal di gambarkan untuk seberapa banyak efisiensi penggunaan pendapatan asli daerah	$\text{Rasio kapasitas fiskal} = \frac{\text{PDRB Daerah/Jumlah Penduduk}}{\text{Kapasitas Fiskal Standar}}$	Rasio

### Hasil Penelitian

#### Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan kondisi data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pinjaman dalam laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kota Bandung, maka untuk rasio kemandirian Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2008-2012 dapat terlihat pada Tabel 3 berikut:

**Tabel 3**  
**Rasio Kemandirian Keuangan**

Keterangan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	324.627.155. 412	360.152.627. 690	441.863.068. 294	833.254.175. 288	1.005.580.00 0.000
<b>Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi (Rp)</b>	1.694.214.13 3.777	2.042.314.35 2.035	2.111.430.80 0.377	2.282.042.34 8.617	2.259.640.00 0.000
<b>Rasio Kemandirian (%)</b>	19,16	17,63	20,92	36,51	44,5
<b>Kemampuan Keuangan</b>	Instruktif	Instruktif	Instruktif	Komunikatif	komunikatif

Rasio kemandirian yang kurang baik menunjukkan bahwa sumber penerimaan daerah yang didapat belum maksimal. Hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah yang dapat digali belum secara maksimal oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung. Sumber-sumber potensial PAD masih banyak yang dikuasai oleh pemerintah pusat, sedangkan untuk pajak yang cukup besar masih dikelola oleh pemerintah pusat, yang dalam pemungutannya berdasarkan undang-undang/persyaratan pemerintah dan daerah hanya menjalankan serta menerima bagian dalam bentuk dana perimbangan. Dana perimbangan itu sendiri terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bantuan Pemerintah Propinsi. Untuk dapat mengatasi hal tersebut pemerintah daerah harus dapat mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatan yang telah ada. Diperlukan inisiatif, kreatifitas dan inspirasi dalam meningkatkan PAD. Pemerintah daerah harus lebih jeli dalam mencari jalan yang dapat mengurangi kekurangannya dan ketergantungannya pada pemerintah pusat. Adapun indikator kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

#### Rasio Efektivitas

Berdasarkan kondisi data laporan realisasi PAD dan target PAD dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandung, maka untuk menghitung efektivitas pemerintah Kota Bandung Tahun 2008-2012 dapat terlihat pada tabel berikut:

**Tabel 4**  
**Rasio Efektivitas**

Keterangan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	324.627.155.412	360.152.627.690	441.863.068.294	833.254.175.288	1.005.580.000.000
<b>Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)</b>	327.508.555.275	374.713.000.000	412.183.526.157	609.122.472.971	755.459.217.229
<b>Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah (%)</b>	99,12	96,11	107,2	136,79	133,1

Dilihat hasil analisis penurunan efektifitas pada tahun 2009 disebabkan karena adanya penurunan retribusi daerah yakni pada tahun 2008 sebesar Rp.73.832.886.129 sedangkan pada tahun 2009 menjadi Rp.68.912.741.347. Walaupun pada komponen pendapatan asli daerah yang lain mengalami kenaikan, namun dengan turunnya retribusi daerah cukup bisa mempengaruhi pada tingkat efektifitas. Pada tahun 2012 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yakni pada tahun 2011 sebesar Rp.10.328.426.076, sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi Rp.7.227.067.446.

Pada tahun 2009 ada masalah pada pemungutan pendapatan retribusi daerah kota Bandung yang nilainya cukup jauh antara anggaran dan realisasinya Tahun 2011 PAD Kota Bandung mengalami masalah pada pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yaitu realisasinya menurun sebesar 94,31%. Namun secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir Kota Bandung sudah efektif dalam mencapai target PAD, karena secara keseluruhan mencapai 120,5%.

#### **Rasio Pertumbuhan**

Membandingkan total PAD dan total pendaptan dari periode ke periode berikutnya yaitu tahun 2008-2009, tahun 2009-2010, tahun 2010-2011 dan tahun 2011-2012.maka didapat rasio pertumbuhan Kota Bandung seperti yang tertera pada tabel berikut:

**Tabel 5**  
**Rasio Pertumbuhan**

Keterangan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	324.627.155.412	360.152.627.690	441.863.068.294	833.254.175.288	1.005.580.000.000
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (%)		10,94	12,3	22,69	20,68

Pertumbuhan daerah baik atau buruknya memang tidak bisa dilihat semata-mata dari rasio pertumbuhan saja, karena rasio pertumbuhan hanya menggambarkan secara sempit tentang perkembangan pertumbuhan pada pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang menurun pada tahun 2012 tidak bisa dikatakan sebagai kegagalan pada penagihannya, karena komponen yang mengalami penurunan hanya pada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Point tersebut menurun karena pendapatan dari point tersebut memang bersifat tidak konstan, dimana hasil yang didapat sangat bergantung pada transaksi yang ada kaitannya dengan aset daerah. Hal yang paling dominan dapat mempengaruhi pendapatan yang bersumber dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah penjualan aset daerah, apabila penjualan aset daerah jumlahnya kecil, maka secara otomatis akan berdampak signifikan pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### Rasio Aktivitas

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Bandung tahun 2008-2012 maka perbandingan antara belanja rutin dan belanja pembangunan didapat hasil perbandingan sebagai berikut:

**Tabel 6**  
**Rasio Aktivitas**

#### Rasio belanja Operasi

Keterangan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Total Belanja Operasi (Rp)	1.713.759.759.665	1.849.323.412.078	2.069.506.559.665	1.863.118.078.887	2.682.610.000.000
Total APBD (Rp)	2.018.841.349.189	2.042.314.352.035	2.553.293.868.671	3.115.296.523.905	3.666.690.000.000
Rasio Belanja operasi (%)	84%	77%	81%	60%	73,16%

**Rasio Belanja Modal**

Keterangan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Total Belanja Modal (Rp)	345.160.822.373	390.988.308.073	300.159.135.161	1.217.229.600.116	806.665.000.000
Total APBD (Rp)	2.018.841.349.189	2.042.314.352.035	2.553.293.868.671	3.115.296.523.905	3.666.690.000.000
Rasio Belanja Modal (%)	16%	23%	19%	40%	26%

Rata-rata belanja yang dilakukan pemerintah Kota Bandung digunakan sebagai belanja operasi bukan untuk belanja modal, padahal seharusnya belanja modal adalah hal yang paling diutamakan dalam penggunaan pendapatan daerah. Belanja modal harus diutamakan karena bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga dapat terasa langsung oleh masyarakat hasil pemungutan pajak yang dikenakan pada masyarakat. Pengalokasian belanja yang masih kurang baik ini dilakukan dari tahun ke tahun, bahkan hingga tahun 2012 hal tersebut belum juga mengalami perbaikan. Angka pada belanja operasi memang cenderung tinggi namun selalu mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan.

Belum ada patokan yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah dinegara berkembang peranan pemerintah daerah untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relative masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan didaerah.

Nama pada akun belanja rutin adalah sama dengan belanja operasi sedangkan nama akun belanja pembangunan sendiri adalah belanja modal. Dan nama akun belanja operasi dan belanja modal tercantum pada PP Nomor 24 tahun 2005.

**Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD). Berikut ini adalah hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal Pemerintah Daerah Kota Bandung tahun 2008 sampai 2012:

**Tabel 7**  
**Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Keterangan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Pendapatan Asli Daerah (Rp)	324.627.155.412	360.152.627.690	441.863.068.294	833.254.175.288	1.005.580.000.000
Total Penerimaan Daerah (Rp)	2.018.841.349.189	2.042.314.352.035	2.553.293.868.671	3.115.296.523.905	3.666.690.000.000
Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (%)	16%	17,63%	17,51%	26,74%	27,42%

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat terlihat bahwa kemampuan daerah dalam mengelola kemampuan daerahnya secara umum berada pada kategori cukup yaitu memiliki rata-rata sebesar 20,53%. Kemandirian daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya cukup mandiri dan tidak begitu bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Dengan mandirinya sebuah daerah maka akan dapat juga mengurangi beban dari pemerintah pusat, namun pemerintah pusat juga tidak akan lepas tangan dengan membiarkan daerah secara mandiri mengatur daerahnya tanpa ada pengawasan dan bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi.

Desentralisasi fiskal adalah salah satu pendukung pelaksanaan otonomi daerah dikarenakan kemampuan keuangan daerah merupakan hal yang harus diperhitungkan dalam pelaksanaan otonomi dalam sebuah daerah. Indikator penting keberhasilan kemampuan keuangan daerah tercermin dalam kemampuan suatu daerah untuk menggali pendapatan asli daerah (PAD) nya yang digunakan untuk membiayai belanja rutin dan pembangunan di daerah tersebut. Dilain pihak sebagai daerah otonom yang tetap menjadi bagian dari negara kesatuan, daerah masih harus tetap melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan pemerintah pusat pada pemerintah daerah. Kewenangan untuk melaksanakan tugas tersebut tentu saja disertai dengan pembiayaan dan bantuan dari pusat. Selain itu, mengingat kondisi dan potensi masing-masing daerah otonomi yang berbeda-beda, pemerintah pusat juga memberikan dana perimbangan yang bertujuan untuk melakukan pemerataan dalam pembangunan.

#### **Rasio Kapasitas Fiskal**

Kapasitas fiskal untuk mengukur derajat kemampuan fiskal pada suatu pemerintah daerah, jika hasil perhitungan tinggi maka kemampuan fiskal nya tinggi. Perhitungan kapasitas fiskal Kota Bandung dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

**Tabel 8**  
**Rasio Kapasitas Fiskal**

Keterangan	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
<b>PDRB Kota Bandung (Rp)</b>	25.749.394	29.625.574	34.240.720	39.219.772	42.424.397
<b>Jumlah Penduduk Kota Bandung (Rp)</b>	6.232.112	6.297.902	6.348.998	6.535.603	6.599.976
<b>PDRB Jawa Barat</b>	15.234.771	16.293.466	17.921.649	19.645.670	20.531.570
<b>Jumlah penduduk Jawa Barat</b>	42.836.791	43.429.709	43.915.787	44.773.447	44.156.190
<b>Kapasitas Fiskal standar (%)</b>	413	470	539	601	642
<b>Rasio Kapasitas Fiskal (%)</b>	35,56	37,51	40,8	43,87	46,5

Hasil tersebut diperoleh dari perbandingan antara PDRB dengan jumlah penduduk dan kapasitas fiskal standarnya, oleh karena itu kalau ingin menginginkan hasil yang semakin meningkat maka dalam hal ini pemerintah daerah Kota Bandung harus bersuaha untuk meningkatkan PDRB. Salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari PDRB, karena PDRB dapat dilihat dari 3 komponen, yaitu komponen produksi, komponen pendapatan dan pengeluaran. Namun tiga komponen yang paling sering dijadikan tolok ukur keberhasilan bidang ekonomi adalah komponen produksi.

Komponen produksi dapat dilihat sebagai hasil perhitungan dari keseluruhan aktivitas produksi baik dari pemerintah maupun swasta, dari sektor pertanian, industri dan jasa selama kurun waktu satu tahun. Lebih lanjut aktivitas produksi atau kegiatan ekonomi masyarakat dalam suatu daerah dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri pengolahan, sektor listrik & air, sektor bangunan dan konstruksi, sektor perdagangan hotel & restoran, sektor pengangkutan & komunikasi. Dari ketiga faktor tersebut yang paling dijadikan tolok ukur sebagai pengukur kinerja keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah adalah faktor produksi. Faktor produksi merupakan yang menghitung keseluruhan kegiatan produksi baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun yang dilakukan sektor swasta, dari aktivitas industri manufaktur, industri pertanian dan industri jasa. Baik yang dilakukan oleh pengusaha besar, menengah maupun Usaha Kecil Dan Mikro.

Kemampuan Pemerintah Daerah Kota Bandung ditinjau dari kapasitas fiskalnya dari hasil perhitungan pada tabel dimana kapasitas fiskal Kota Bandung semakin lama semakin tinggi. Pada tahun 2008 kapasitas fiskal Kota Bandung sebesar 35,56%, tahun 2009 kapasitas fiskal Kota Bandung 37,51, tahun 2010 mengalami kenaikan sehingga menjadi 40,80%, tahun 2011 jumlah kapasitas fiskal naik lagi menjadi 43,87% dan pada tahun 2012 kapasitas fiskal mencapai 46,50%. Kapasitas yang tinggi dipengaruhi oleh Luas Wilayah atau Banyaknya kecamatan yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu Kota Bandung mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi.

## **Pembahasan**

### **Rasio Kemandirian**

Pemerintah daerah dalam mengetahui apakah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) berada dalam tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kota Bandung sudah optimal dalam arti sesuai dengan kebutuhan atau belum, maka peneliti menggunakan

metode analisis ratio kemandirian. Adapun rasio kemandirian daerah Kota Bandung selama tahun 2008-2012 dapat dianalisis sebagai berikut:

- a. Perbandingan antara total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah pada pemerintah Kota Bandung dengan total pendapatan pada tahun anggaran 2008 dari dana/ bantuan Pemerintah yang bersumber dari bantuan pusat, bantuan provinsi, dan sumber lain. Dari hasil perbandingan tersebut nilai rasio yang diperoleh sebesar 19,16 %.
- b. Perbandingan antara total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah pada pemerintah Kota Bandung dengan total pendapatan pada tahun anggaran 2009 dari dana/ bantuan Pemerintah yang bersumber dari bantuan pusat, bantuan provinsi, dan sumber lain. Dari hasil perbandingan tersebut nilai rasio yang diperoleh sebesar 17,63 persen.
- c. Perbandingan antara total realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah pada pemerintah Kota Bandung dengan total pendapatan pada tahun anggaran 2010 dari dana/ bantuan Pemerintah yang bersumber dari bantuan pusat, bantuan provinsi, dan sumber lain. Dari hasil perbandingan tersebut nilai rasio yang diperoleh sebesar 30,92 persen.
- d. Perbandingan antara total realisasi PAD yang meliputi ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah pada pemerintah Kota Bandung dengan total pendapatan pada tahun anggaran 2011 dari dana/ bantuan Pemerintah yang bersumber dari bantuan pusat, bantuan provinsi, dan sumber lain. Dari hasil perbandingan tersebut nilai rasio yang diperoleh sebesar 36,51 persen.
- e. Perbandingan antara total realisasi PAD yang meliputi ; pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD serta pendapatan lain-lain yang sah pada pemerintah Kota Bandung dengan total pendapatan pada tahun anggaran 2012 dari dana/ bantuan Pemerintah yang bersumber dari bantuan pusat, bantuan provinsi, dan sumber lain. Dari hasil perbandingan tersebut nilai rasio yang diperoleh sebesar 44,50 persen.

**Tabel 4.7 Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah**

Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
0-25	Instruktif/ Rendah Sekali
25-50	Konsultatif/ Rendah
50-75	Partisipatif. Sedang
75-100	Delugatif. Tinggi

Sumber: Abdul Halim 2007

**Rasio Efektivitas**

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. (Halim ; 2007). Adapun hasil perhitungan rasio efektivitas pada Kota Bandung adalah sebagai berikut:

1. Rasio efektivitas untuk tahun 2008 sebesar 99,12 % merupakan hasil total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2008.
2. Rasio efektivitas untuk tahun 2009 sebesar 96,11 % merupakan hasil total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2009.

3. Rasio efektivitas untuk tahun 2010 sebesar 107,2 % merupakan hasil total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2010.
4. Rasio efektivitas untuk tahun 2011 sebesar 136,79 % merupakan hasil total realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2011.
5. Rasio efektivitas untuk tahun 2012 sebesar 133,1 % merupakan hasil total realisasi penerimaan PAD dibandingkan dengan target PAD selama tahun 2012.

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa rasio efektivitas pemerintah kota Bandung dalam melaksanakan pemungutan pendapatan daerah antara tahun 2008-2012 berkisar antara 99,12% sampai 133,11%. Dimana tiap tahun mengalami peningkatan, namun pada tahun 2009 dan 2012 sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 3,01% dari tahun sebelumnya dan pada tahun 2012 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,69% dari tahun sebelumnya.

Dengan melihat sangat efektifnya pengelolaan keuangan pemerintah Kota Bandung maka dapat dikatakan bahwa Kota Bandung layak disebut sebagai kota yang berhasil dalam mengelola keuangannya, dapat memaksimalkan pemungutan-pemungutan terutama pada pendapatan asli daerah. Hasil pemungutan pendapatan asli daerah rata-rata berada di atas target yang sudah direncanakan dalam anggaran. Adapun indikator penilainya adalah sebagai berikut

**Tabel 9 Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan**

Presentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Diatas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
80-60%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

**Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan**

**Rasio Pertumbuhan**

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*), Halim (2007 :128) rasio pertumbuhan dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. Rasio pertumbuhan dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Adapun rasio pertumbuhan yang dicapai pemerintah Kota Bandung selama tahun 2008-2012 dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Hasil ini diperoleh dari total PAD) tahun 2009 dikurangi dengan total Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2008 dibagi dengan total pendapatan asli daerah tahun 2008 di kali seratus persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2008 ke tahun 2009 hanya mencapai 10,94 %.
2. Hasil ini diperoleh dari total PAD tahun 2010 dikurangi dengan total PAD tahun 2009 dibagi dengan total pendapatan asli daerah tahun 2009 di kali seratus persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2009 ke tahun 2010 hanya mencapai 12,3 %.

3. Hasil ini diperoleh dari total PAD tahun 2011 dikurangi dengan total PAD tahun 2010 dibagi dengan total pendapatan asli daerah tahun 2010 di kali seratus persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan asli daerah dari tahun 2010 ke tahun 2011 hanya mencapai 11,69 %.
4. Hasil ini diperoleh dari total PAD tahun 2012 dikurangi dengan total PAD tahun 2011 dibagi dengan total PAD tahun 2011 di kali seratus persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan PAD dari tahun 2011 ke tahun 2012 hanya mencapai 20,68 %.

Rasio pertumbuhan pendapatan Kota Bandung dari tahun ke tahun sangat baik, karena selalu mengalami kenaikan, namun pada tahun 2012 mengalami penurunan yang disebabkan karena pada pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan dari tahun 2011 yaitu Rp.10.328.428.076 dan pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp.7.227.076.446. Apabila di rata-ratakan kenaikan pendapatan asli daerah tiap tahunnya adalah sebesar 16,65%.

### **Rasio Aktivitas**

Dari hasil perhitungan Tabel 5, menunjukkan bahwa belanja aparatur daerah kurang stabil tiap tahunnya terlihat pada persentase belanja rutin dan belanja pembangunan yang tidak stabil tiap tahunnya. Terjadi penurunan persentase belanja operasi pada tahun 2009 dan tahun 2011.

Pada tahun 2008 rasionya sebesar 85%, pada tahun 2009 rasionya turun menjadi 77%, pada tahun 2010 rasionya naik menjadi 81%, pada tahun 2011 rasionya turun menjadi 60%, pada tahun 2011 rasionya naik lagi menjadi 73%. Rasio belanja modal pada tahun 2008 sebesar 17,09%, pada tahun 2009 turun menjadi 16,27%, pada tahun 2010 turun menjadi 11,75%, pada tahun 2011 naik menjadi 39,07% dan pada tahun 2012 turun menjadi 22%.

Rasio belanja rutin dan belanja pembangunan secara umum masih belum stabil. Sebagian besar dana yang dimiliki daerah masih dioptimalkan untuk kebutuhan belanja operasi, sehingga perbandingan antara rasio belanja modal terhadap APBD lebih kecil, namun pada perkembangannya mengalami peningkatan yang positif karena tahun ke tahun rasio belanja rutin menjadi lebih kecil sedangkan belanja pembangunan meningkat.

### **Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal**

Rasio derajat desentralisasi fiskal Kota Bandung semakin tahun semakin mengalami kemajuan, karena semakin lama rasionya semakin tinggi. Pada tahun 2009 rasionya sebesar 16%, pada tahun tersebut pemerintah daerah tidak menerima bantuan keuangan dari pemerintah provinsi dan penerimaan dana transfer dari pemerintah provinsi hanya berupa dana bagi hasil pajak saja sebesar Rp.304.212.972.140. Pada tahun 2009 juga pemerintah daerah Kota Bandung hanya menerima bantuan transfer berupa bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi dan pemda lainnya sebesar Rp.332.362.327.947., namun angka dana bagi hasil tersebut lebih besar dari tahun sebelumnya.

Tahun 2010 pemerintah Kota Bandung juga hanya menerima dana bagi hasil pajak sebagai pendapatan transfer dari pemerintah provinsi yaitu sebesar Rp.321.817.451.034, angka tersebut sedikit berkurang jumlahnya bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2011 pendapatan yang di dapat dari transfer pemerintah provinsi lebih banyak yaitu terdiri dari hibah Rp.7.500.000.000, dana bagi hasil pajak pemerintah provinsi dan pemda lainnya sebesar Rp.419.345.480.502, dana penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp.364.397.875.479, dan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi atau pemda lainnya sebesar Rp.84.064.732.500.

Dengan demikian kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan mampu membuka peluang pemerintah Kota Bandung untuk meningkatkan efektifitas pencapaian kesejahteraan

masyarakat dan pemerataan pembangunan, selanjutnya diharapkan akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandung.

### Rasio Kapasitas Fiskal

Kemampuan Pemerintah Kota Bandung ditinjau dari kapasitas fiskalnya dari hasil perhitungan pada tabel dimana kapasitas fiskal Kota Bandung semakin lama semakin tinggi. Pada tahun 2008 kapasitas fiskal Kota Bandung sebesar 35,56%, tahun 2009 kapasitas fiskal Kota Bandung 37,51, tahun 2010 mengalami kenaikan sehingga menjadi 40,80%, tahun 2011 jumlah kapasitas fiskal naik lagi menjadi 43,87% dan pada tahun 2012 kapasitas fiskal mencapai 46,50%. Kapasitas yang tinggi dipengaruhi oleh Luas Wilayah atau Banyaknya kecamatan yang ada di daerah tersebut, oleh karena itu Kota Bandung mempunyai kapasitas fiskal yang tinggi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian pada Pemerintah Daerah Kota Bandung maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu ; Pertama, Kemandirian keuangan Kota Bandung selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami peningkatan, namun berada pada kategori tidak optimal terlihat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menuju kemandirian keuangan pemerintah Kota Bandung masih sangat rendah dengan rasio di bawah 100%, sehingga dana pemerintah pusat masih dominan dalam pembiayaan pemerintahan.

Kedua, Kemampuan Pemerintah Kota Bandung dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2008 sampai dengan 2012 mengalami peningkatan dari anggaran PAD. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan PAD telah efektif karena rasio yang diperoleh di atas 100%.

Ketiga, Pertumbuhan PAD di Kota Bandung juga mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dengan kategori tidak baik untuk tahun 2008-2012, mengalami peningkatan yakni dengan kategori kurang baik. Dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun analisis (2008-2012) tidak baik dan berada di bawah rasio standar yakni 100.

Keempat berdasarkan perhitungan rasio aktivitas (keserasian), dibedakan menjadi dua jenis, yang pertama adalah berdasarkan rasio belanja operasi dan belanja modal dari tahun 2008 – 2012. Rasio belanja operasi dan belanja modal dikatakan baik tiap tahun ketahun rasio belanja operasi mengalami penurunan sedangkan rasio belanja modal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Kelima derajat desentralisasi fiskal terlihat bahwa kemampuan daerah dalam mengelola kemampuan daerahnya secara umum berada pada kategori cukup yaitu memiliki rata-rata sebesar 20,53%. Kemandirian daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahannya cukup mandiri dan tidak begitu bergantung pada bantuan pemerintah pusat.

Keenam analisis kapasitas fiskal menunjukkan kapasitas fiskal pemerintah Kota Bandung masih lebih rendah bila di bandingkan dengan kapasitas fiskal standar Jawa Barat. Hal ini berarti dalam memenuhi kebutuhan fiskalnya Kota Bandung dapat dikatakan masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat.

### Saran

Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap ratio pengelolaan keuangan kota Bandung serta kesimpulan diatas, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Bandung antara lain sebagai berikut:

Pemerintah daerah Kota Bandung sebaiknya meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana dengan meningkatkan belanja modal khususnya sarana dan prasarana yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah. Meningkatkan pengawasan, pengelolaan dan pendayagunaan aset daerah. Pemerintah juga sebaiknya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada unit pelayanan teknis daerah dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Pemerintah kota Bandung harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasai oleh pemerintah pusat/ propinsi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kota Bandung dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat dengan diimbangi dengan perluasan lapangan kerja di kota Bandung agar pendapatan masyarakat kota Bandung meningkat sehingga retribusi dan pajak yang dibayar masyarakat meningkat pula.

Cara lain yang bisa di lakukan juga salah satunya adalah dengan meningkatkan pajak yang dipungut oleh daerah agar pendapatan asli daerah semakin meningkat dan pengelolannya juga harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Pembuatan jalan umum dan fasilitas umum yang memadai agar bisa dinikmati oleh masyarakat banyak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. INDEKS.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: (UPP) AMP YKPN.
- \_\_\_\_\_. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Himpunan Peraturan Perundang-Undangan. 2006. *Keuangan Negara*: FOKUSMEDIA.
- Horasman. 2003. *Studi Perbandingan Faktor-Faktor Keuangan Daerah yang Mempengaruhi Tingkat Perkembangan Desentralisasi di Kota Bandung dan Kota Cimahi* [online]. Diakses dari [www.digilib.itb.ac.id](http://www.digilib.itb.ac.id) pada 15 Maret 2014.
- Kaho, Josef Riwu. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lestarie, Noviantie. *Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Cimahi* [online]. Diakses dari [www.digilib.upi.edu](http://www.digilib.upi.edu) pada 15 Maret 2014.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- \_\_\_\_\_. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, Moh. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Riduansyah, M. 2003. *Jurnal Ilmiah Makara Sosial Humaniora*, Volume 7 Nomor 2, Jakarta: Universitas Indonesia.

- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Diakses dari [www.jdih.kominfo.go.id](http://www.jdih.kominfo.go.id) pada 15 Maret 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Diakses dari [www.jdih.kominfo.go.id](http://www.jdih.kominfo.go.id) pada 15 Maret 2014.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diakses dari [www.jdih.kominfo.go.id](http://www.jdih.kominfo.go.id) pada 24 April 2014.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

